



**LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN MEI 2016**

Pendahuluan

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM baik itu dalam pengkajian dan penelitian, peyuluhan, pemantauan dan mediasi, Komnas HAM juga berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan

Pada 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **977 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

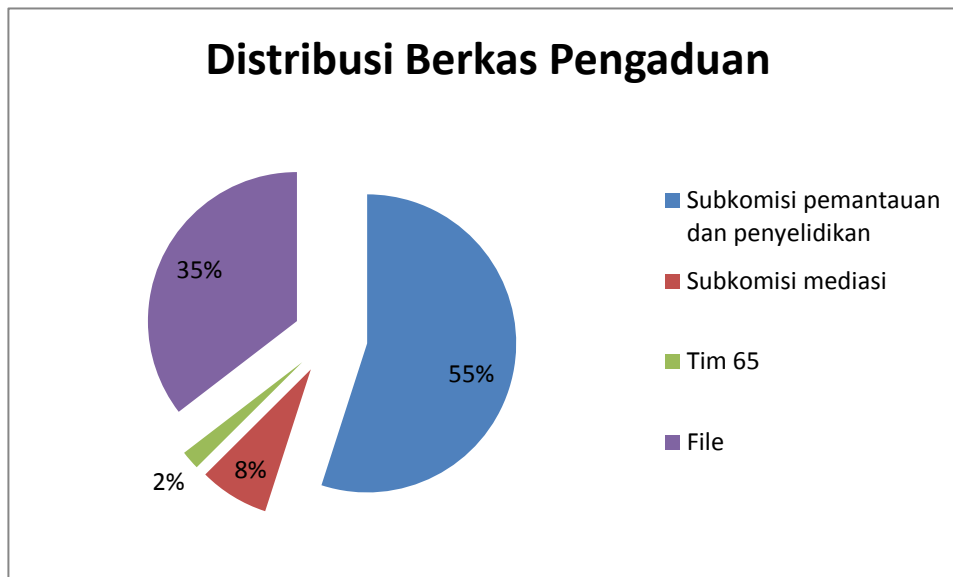
1. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas
1	Aceh	9	20	Kalimantan Barat	6
2	Sumatera Utara	92	21	Kalimantan Selatan	5

3	Bengkulu	7	22	Kalimantan Tengah	12
4	Jambi	15	23	Kalimantan Timur	12
5	Riau	34	24	Kalimantan Utara	2
6	Sumatera Barat	59	25	Gorontalo	8
7	Sumatera Selatan	28	26	Sulawesi Selatan	37
8	Lampung	10	27	Sulawesi Tenggara	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	2	28	Sulawesi Tengah	33
10	Kepulauan Riau	10	29	Sulawesi Utara	9
11	Banten	26	30	Sulawesi Selatan Barat	3
12	Jawa Barat	60	31	Maluku	36
13	DKI Jakarta	234	32	Maluku Utara	0
14	Jawa Tengah	53	33	Papua	3
15	Jawa Timur	93	34	Papua Barat	2
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	12	35	Tanpa Alamat	28
17	Bali	8			
18	Nusa Tenggara Barat	12			
19	Nusa Tenggara Timur	14			

2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi Pemantauan Penyelidikan	537
2	Subkomisi mediasi	74
3	Tim 65	20
5	File	346
Jumlah		977



3. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	466
2	Tembusan	506
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan Ke KH	5
Jumlah		977

4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	111
2	Pos	809
3	Fax	11
4	Email	32
5	Audiensi	1
6	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	13
Jumlah		977

5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	26
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	2
3	Hak mengembangkan diri	16
4	Hak memperoleh keadilan	380
5	Hak atas kebebasan pribadi	24
6	Hak atas rasa aman	69
7	Hak atas kesejahteraan	382
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	8
9	Hak perempuan	5
10	Hak anak	4
1	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	2
12	Non HAM	59
Jumlah		977

5.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	9
Lingkungan hidup	17
Jumlah	26
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	1
Jumlah	1
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	11
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh	4

manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	
Jumlah	15
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	289
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	23
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	59
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	5
Jumlah	376
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	2
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	12
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat	1
Berkumpul, berapat, dan berserikat	2
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	0
Menyampaikan pendapat di muka umum	1
Status kewarganegaraan	2
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	3
Jumlah	23
VI. Hak atas rasa aman	Jumlah berkas
Mencari suaka	0
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	8
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	9
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	16

Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	24
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	12
Jumlah	69
VII. Hak atas kesejahteraan	Jumlah berkas
Hak untuk mempunyai milik	36
Hak atas kepemilikan tanah	149
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	74
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	31
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	76
Hak atas kesehatan	13
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	3
Jumlah	382
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	Jumlah berkas
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	5
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	1
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	2
Jumlah	8
IX. Hak perempuan	Jumlah berkas
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	0
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	0
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	0

Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	1
Hak atas kesetaraan dengan suami	4
Jumlah	5
X. Hak anak	Jumlah berkas
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	1
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	3
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	0
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	0
Jumlah	4
XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	Jumlah berkas
Pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	1
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	1
Jumlah	2
Tidak ada turunan hak	Jumlah berkas
Non Ham	66

6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	499
2	Individu - Anak	18
3	Individu - Perempuan	39
4	Individu - Buruh migran	3
5	Individu - Pekerja / profesi	34
6	Individu - Suku	0
7	Individu - Ras dan etnis	0

8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	0
9	Individu - Penyandang disabilitas	1
10	Individu - Teroris	0
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	8
12	Individu - Lansia	1
13	Individu - Fakir miskin	0
14	Kelompok - Masyarakat	237
15	Kelompok - Anak-anak	4
16	Kelompok - Perempuan	1
17	Kelompok - Buruh migran	0
18	Kelompok - Pekerja / profesi	29
19	Kelompok - Masyarakat adat	19
20	Kelompok - Ras dan etnis	1
21	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	8
22	Kelompok - Penyandang disabilitas	0
23	Kelompok - LGBT	1
24	Kelompok - Teroris	0
25	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	8
26	Kelompok - Lansia	1
27	Organisasi	3
28	Warga negara asing	1
29	Korporasi	7
30	Lembaga Pendidikan	2
31	Polri	1
32	Lembaga Peradilan	1
32	Tidak ada/ Tanpa Nama	50

7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	76
2	Pemerintah daerah	140
3	Lembaga legislatif	0
4	Lembaga negara (Non kementerian)	14
5	Lembaga peradilan	66
6	Kepolisian	321
7	TNI	41
8	Kejaksaan	26
9	Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan	6
10	Pemerintah negara lain	0
11	Korporasi	133
12	BUMN / BUMD	53
13	Lembaga pelayanan kesehatan	3
14	Lembaga pendidikan	12
15	Organisasi	7
16	Individu - Orang seorang	11
17	Individu - Pekerja / profesi	5
18	Kelompok - Masyarakat	6
19	Kelompok - Masyarakat adat	1
20	Individu – Perempuan	3
21	Kelompok - Pekerja	0
23	Tanpa Keterangan Pihak yang diadukan	53

8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Pada Mei 2016, Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga membuat surat keluar untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun

1999¹, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999² dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (c) ucapan terima kasih dengan perincian sebagai berikut:

Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
61	133	17	211

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.

Jakarta, 1 Juni 2016

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN

Rima Purnama Salim

¹Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

²Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi